RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

PERWA NO.61 , BD. 2025 / NO.62, PEMKOT PTK: 105 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025–2029. Peraturan Wali Kota ini mengatur tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat secara terarah, terukur, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah guna mendukung terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta masyarakat yang berdaya dan inklusif. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Wali Kota Potianak Nomor 118 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 September Tahun 2025.

- Penjelasan: - 105 hlm.